

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa tak hanya itu, ragam aliran agama dan kepercayaan juga menambah khazanah kebhinekaan Indonesia. Hingga saat ini ada enam agama yang diakui secara resmi oleh Pemerintah yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu, ditambah berbagai aliran kepercayaan yang berkembang dan dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia yang keberadaannya juga diakui oleh pemerintah. Pemerintah menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan aliran kepercayaan serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2).¹

Meskipun pemerintah telah menjamin kebebasan dalam memeluk agama, memeluk aliran kepercayaan dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya tersebut, namun hingga saat ini masih ada beberapa kasus diskriminasi dan intervensi dari golongan mayoritas kepada golongan minoritas yang dipicu oleh isu agama. Tak jarang diberbagai daerah di Indonesia, diskriminasi dan intervensi ini memantik konflik horizontal antar pemeluk agama maupun penganut aliran kepercayaan. Namun konflik yang terjadi tidak selalu konflik antar umat beragama, dalam beberapa kasus bahkan terjadi konflik antar aliran dalam satu agama. Salah satu contoh konflik internal agama adalah konflik antara Muslim Sunni dengan Muslim Syi'ah.

Sunni dan Syi'ah merupakan dua aliran besar dalam Agama Islam, dalam sejarah perkembangannya antara kedua aliran ini tidak pernah dapat

¹ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 E ayat (1) dan (2).

bersatu. Sunni maupun Syi'ah saling berebut pengaruh dan kekuasaan sejak awal berkembangnya Islam di Nusantara. Pada mulanya pertentangan yang terjadi antara Sunni dan Syi'ah dilatarbelakangi oleh pertentangan hegemoni politik. Namun kemudian lambat laun menjadi pertentangan yang dilatarbelakangi oleh masalah aqidah, thariqat, filsafat dan tasawuf, sekalipun terkadang wajah politiknya menampakkan diri.² Jika awal sejarah kemunculan Syi'ah yang hingga kini menjadi salah satu sekte dalam Islam pada awalnya bermula dari perbedaan kepentingan politik. Pembeneran doktrinal dalam Syi'ah muncul belakangan karena para pengikut Syi'ah merasa perlu mendapatkan legitimasi keagamaan.³

Sementara diantara tokoh ulama Sunni maupun ulama Syi'ah telah terjadi dialog tentang ideologi Sunni-Syi'ah. Dialog yang dilakukan melalui surat-menyurat antara Asy-Syaikh Salim Al-Bisyri Al-Maliki, Rektor Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dengan As Sayyid Syarafuddin Al-Musawi Al-'Amili, seorang ulama terkemuka Syi'ah yang isinya membicarakan tentang ideologi masing-masing⁴. Dalam dialog yang dirangkum dalam sebuah buku tersebut tidak menceritakan adanya pertentangan antara keduanya, surat-menyurat yang dilakukan hanya untuk mengetahui dan lebih mengenal secara mendalam tentang ajaran satu sama lain. Akar pertentangan karena faktor politik antara Sunni-Syi'ah selanjutnya menimbulkan konflik antara kedua aliran tersebut hingga kini.

Sejarah perkembangan aliran Syi'ah di Indonesia sendiri terbagi dalam empat fase, fase *pertama* masuknya aliran Syi'ah ke Nusantara bersamaan dengan masuknya Agama Islam ke Nusantara, para sejarawan nasional menyebutkan fakta bahwa Syi'ah telah ada sejak

² A. Hasjmy, *Syi'ah dan Ahlussunah Saling Rebut Pengaruh dan Kekuasaan Sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara* (Surabaya : Bina Ilmu, 1983), hlm. 52

³ Musahadi HAM dkk, *Mediasi dan resolusi Konflik di Indonesia, Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan* (Semarang : Walisongo Mediation Center, 2007), hlm 62.

⁴ A. Syarafuddin Al-Musawi, *Dialog Sunnah-Syi'ah, Surat Menyurat Antara As Syaikh Salim Al-Bisyri Al-Maliki, Rektor Al-Azhar dan Asy Sayid Syarafuddin Al Musawi Ulama Besar Syi'ah* (Bandung: Mizan, 1983)

Islam masuk ke Indonesia. Tradisi seperti tabuik, tari Saman, tradisi ziarah kubur dan peringatan satu Suro adalah bentuk infiltrasi ajaran Syi'ah dalam tradisi muslim Indonesia.⁵ Fase *Kedua* yaitu pasca revolusi Islam di Iran, keberhasilan revolusi Islam Iran dengan paham Syi'ah sebagai basis ideologi telah banyak menginspirasi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Para aktivis Islam melihat revolusi Iran sebagai gerakan politik dan sebagai alternatif pemikiran. Gagasan-gagasan para tokoh di balik Revolusi seperti Ayatollah Khomeini, Ali Syariati, Muthahari banyak dikaji oleh cendekiawan muda Indonesia. Fase *Ketiga* adalah pasca era keterbukaan setelah reformasi. Pasca reformasi banyak cendekiawan dan intelektual muda muslim pergi menuntut ilmu ke Iran khususnya di Khumm, setelah mereka kembali ke Indonesia mereka mengembangkan gagasan-gagasannya tentang Islam di Iran dan Syi'ah. Fase *keempat* aktivitas Syi'ah semakin terorganisir setelah komunitas Syi'ah mendirikan organisasi pengikut Syi'ah seperti ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia (Ijabi) yang berdiri sejak 1 Juli 2000.⁶

Berkembangnya aliran Syi'ah di Indonesia tak lepas dari peran dua organisasi Syi'ah di Indonesia yaitu Ijabi (Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia) dan Lembaga Komunikasi Ahlul Bait (LKAB) yang akhirnya berkembang menjadi ABI (Ahlul Bait Indonesia). Ijabi didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 2000 di Gedung Merdeka Bandung. Ijabi didirikan dengan tujuan untuk menghimpun para pecinta keluarga Nabi Muhammad SAW (*Ahlul Bait*) apapun madzhab dan alirannya.⁷ Tokoh awal sekaligus pemimpin Ijabi pada periode awal adalah Prof. Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc, selaku ketua Dewan Syura dan Dr.Ir. Dimitri Mahayana, M.Eng sebagai Ketua Pelaksana (rais) *Tanfidziyah*. Dalam visinya, Ijabi selalu berusaha mengamalkan nilai-nilai keislaman dan menghargai

⁵ Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan : Analisa Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual* (Jakarta: Elex Media Computindo, 2014), hlm. 68

⁶ Ibid, hlm 69

⁷ <http://www.ijabi.or.id/tentang-kami.html> , Kelahiran IJABI, diakses pada 11 Agustus 2018.

pluralitas dengan menggunakan pendekatan kultural. Penekanan pada prinsip-prinsip “kemuliaan akhlak” dan penghargaan pada keragaman (pluralitas) menjadi ciri khas Ijabi dalam mewujudkan berbagai programnya. Maka diharapkan dengan pendekatan tersebut, Ijabi juga ikut serta dalam upaya membangun kehidupan keberagaman yang toleran dan menghindari radikalisme keagamaan yang cenderung menampakkan wajah agama yang penuh kebencian dan permusuhan. Sedangkan LKAB atau lembaga Komunikasi Ahlul Bait didirikan pada tahun 2001 kemudian bertransformasi menjadi ABI atau Ahlul Bait Indonesia didirikan pada 25 Juli 2010. Jamaah Ahlul Bait Indonesia menunjuk Hassan Alaydrus sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia dan Umar Shahab sebagai Ketua Dewan.⁸ Lembaga ini menampung para alumnus Universitas Qum dan difasilitasi oleh Islamic Cultural Center (ICC) yang dibentuk oleh Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia.⁹

Berkembangnya aliran Syi'ah di Indonesia hingga kini masih belum dapat diterima oleh penganut Sunni, karena dalam pandangan Sunni, Syi'ah bukan merupakan bagian dari Islam karena keyakinan yang berbeda. Adapun perbedaan keyakinan yang Syi'ah yakini antara lain : Kelompok Syi'ah meyakini bahwa Ali adalah imam yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sepeninggal wafatnya beliau melalui ketetapan *nash* (dasar hukum) yang jelas.¹⁰ Sedangkan muslim Sunni tetap berkeyakinan bahwa penerus kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad adalah Abu Bakar Ash Shidiq yang ditetapkan berdasarkan *baiat* para sahabat. Masalah terpenting yang menjadi perselisihan antara Muslim Sunni dan Syi'ah adalah mengenai *mushaf* Al-

⁸ http://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/?page_id=1494 , Sejarah Ahlul Bait Indonesia, diakses pada 11 Agustus 2018.

⁹ Dr (HC) KH Ma'ruf Amin, *et.all* , *Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Syi'ah di Indonesia*, (Jakarta, Gema Insani, 2013) hlm. 88

¹⁰ Salah satu *nash* (dasar hukum) yang menyebutkan Ali sebagai pemimpin umat Islam adalah ketika nabi Muhammad menyampaikan di Ghadir Kum, suatu tempat diantara Makkah dan Madinah setelah peristiwa haji Wada'. Hadis ini disampaikan didepan 15.000 sahabat, Nabi menyatakan sambil memegang tangan Ali dan berseru “Barangsiapa menjadikan aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Ya Allah, tolonglah orang yang menolongnya dan musuhi orang yang memusuhinya”

Qur'an. Ahlus Sunnah (Sunni) dan madzhab-madzhab nya berpandangan bahwa Al-Qur'an merupakan akhir dari segala kitab, isi Al-Qur'an tidak dapat dirubah dan diganti hingga akhir dunia nanti. Namun dalam hal ini para penganut Syi'ah tidak meyakini terhadap keautentikan Kitab Suci Al-Qur'an yang beredar dikalangan umat Islam. Penganut Syi'ah beranggapan bahwa dua pertiga ayat Al-Qur'an telah dirubah dan tidak sesuai seperti saat diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.¹¹

Perbedaan-perbedaan yang terjadi antara Ahlus Sunnah (Sunni) dan Syi'ah bukan lagi perbedaan yang bersifat *furu'iyah* (cabang) namun sudah pada tataran *asasiyyah* (pokok) sehingga perbedaan ini sering menimbulkan konflik karena Sunni menganggap Syi'ah bukan bagian dari Islam. Tidak hanya konflik berlatar belakang ideologi, namun konflik sudah meningkat kepada konflik dengan kekerasan fisik. Konflik antara penganut Sunni-Syi'ah tidak hanya terjadi sekali saja, tercatat dalam catatan Majelis Ulama Indonesia beberapa kasus konflik Sunni-Syi'ah di Indonesia. Berikut beberapa catatan konflik yang terjadi¹²:

1. Pembakaran Pondok Pesantren Syi'ah, Ponpes Al Hadi, Desa Brokoh, Kecamatan Wono Tunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada 14 April 2000 yang menyebabkan beberapa rumah rusak, satu mobil dirusak, dan satu gudang material dibakar massa.
2. Demonstrasi anti Syi'ah di Jawa Timur, pada 24 Desember 2006 yang mengakibatkan 3 rumah hancur, 2 Mushalla rusak. Dan pada pertengahan November 2006 di Bondowoso terjadi kerusuhan sosial yang melibatkan komunitas Syi'ah.
3. Pada 9 April 2007, kelompok Sunni di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang membubarkan pengajian Maulid Nabi yang dilakukan oleh kelompok Syi'ah.

¹¹ Ihsan Ilahi Zhahir, *Salah Paham Sunnah-Syi'ah*, (Bandung: Penerbit Risalah, 1984) hlm. 103

¹² Mohammad Baharun, *Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Syi'ah di Indonesia* (Jakarta, Al-Qalam, 2013) hlm. 62

4. Pada 20 April 2007, gabungan ormas Islam (Muhammadiyah, Nahdkatul Ulama, dan Persis) berjumlah 200 orang dan menamakan diri mereka HAMAS yang dipimpin oleh Habib Umar Assegaf berencana mendatangi Pesanteri YAPI Bangil, Pasuruan, Jawa Timur.
5. Pada tanggal 13 Januari 2008, 200 orang melakukan pembubaran kelompok Syi'ah di Yayasan Al-Qurba di Lombok Barat, NTB.
6. Pada 29 Desember 2011, kelompok Sunni yang kehabisan kesabaran, membakar beberapa rumah dan fasilitas ibadah (mushalla) pemimpin Syi'ah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kab. Sampang Madura. Tidak ada korban dalam konflik ini. Warga Syi'ah diungsikan ke GOR Wijaya Kesuma Sampang.
7. Pada 26 Agustus 2012, konflik horizontal Sunni-Syi'ah kembali terjadi di Sampang. Kali ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia, 10 orang terluka, dan 37 rumah warga hangus terbakar.
8. Pada Juni 2013, 64 kepala keluarga pengungsi Syi'ah yang menetap di GOR Sampang selama 10 bulan, akhirnya direlokasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke rumah susun Puspo Agro, Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.¹³
9. Konflik antara Sunni dan Syi'ah kembali terjadi pada 11 September 2013, di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, massa melakukan perusakan terhadap beberapa lokal gedung Pondok Pesantren Darus Sholihin yang diduga pengikut aliran Syiah.¹⁴
10. Pada 29 September 2013, dilakukan proses rekonsiliasi (*islah*) antara Sunni dan penganut Syi'ah namun proses ini menemui kegagalan karena pihak Sunni menuntut syarat agar para

¹³ F Arfani 2013, "Gubernur Jatim Jamin Aset Warga Syiah Aman", antaranews, 28 Juni 2013 dikases melalui <www.antaranews.com>.

¹⁴ Natalia Sinaga, "Toleransi Antara Kelompok Sunni dan Syi'ah Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2012-2013". *Tesis Magister*. (Bogor : Fakultas Strategi Pertahanan Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan, 2015) hlm 5

penganut Syi'ah segera bertaubat meninggalkan ajaran Syi'ah dan kembali kepada ajaran *ahlussunnah wal jama'ah* (Sunni).¹⁵

11. Desember 2013, Presiden SBY bersama Menteri Agama kala itu, Suryadharma Ali mengunjungi Desa Karanggayam dan Bluru'an Sampang, Madura, dan mengadakan pertemuan bersifat tertutup bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo beserta pimpinan daerah Sampang. Pertemuan menghasilkan tiga poin, *Pertama* anjuran SBY agar konflik serupa tidak terjadi, *Kedua* menyerahkan penyelesaian konflik kepada Pemkab Sampang, *Ketiga* agar konflik dapat diselesaikan sebelum masa jabatan Presiden SBY berakhir pada 2014.¹⁶
12. Februari 2018, setelah lima tahun berada di pengungsian rumah susun Puspoagro, Sidoarjo. Para pengungsi Syi'ah menuntut kepada pemerintah untuk memulangkan pengungsi Syi'ah ke kampung halamannya. Perwakilan pengungsi Syi'ah, Iklil Al-Milal mengungkapkan bahwa tuntutan mereka merupakan realisasi penegakan Hak Asasi Manusia.¹⁷
13. 14 Juni 2018, Jenazah Khurriyah, 24 tahun, salah satu pengungsi Syi'ah asal Sampang, Madura, yang meninggal dunia pada Rabu malam, 13 Juni 2018, tidak bisa dimakamkan di kampung halamannya di Desa Karanggayam, Sampang, Madura, karena ditolak warga setempat. Ambulans yang membawa jenazah dari RS Dr. Soetomo Surabaya dicegat aparat di Sampang Kota.¹⁸

¹⁵ Camelia Pasandaran 2013, "Manisnya Proses Islah Sunni dan Syiah Sampang", Berita Satu, 24 September 2013 diakses melalui <http://www.beritasatu.com/nasional/140282-manisnya-proses-islah-sunni-dan-syiah-sampang.html>

¹⁶ Nadia Farabi, "Hambatan Pemulangan Pengungsi Internal Syiah Sampang Dan Ahmadiyah Lombok". *Tesis Magister*. (Yogyakarta; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, 2015)

¹⁷ Petrus Riski, 2018, "Pemerintah Dituntut Tegakkan Hukum dan HAM dengan Pulangkan Pengungsi Syiah Sampang", VOA Indonesia, 28 Februari 2018. <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-dituntut-tegakka>

¹⁸ Nur hadi, 2018, "Jenazah Pengungsi Syiah dari Sampang Ditolak Penduduk Kampungnya" dalam <https://nasional.tempo.co/read/1098059/jenazah-pengungsi-syiah-dari-sampang-ditolak-penduduk-kampungnya> diakses pada 4 Agustus 2018.

Dari beragam kasus konflik Sunni-Syi'ah, yang mencapai eskalasi tertinggi adalah kasus yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012. Tepatnya seminggu setelah perayaan Idul Fitri, warga yang saat itu sedang merayakan *ba'da kupa*t dikagetkan oleh peristiwa penyerangan dan pembakaran yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap jamaa'ah Syi'ah. Dalam penyerangan ini satu orang meninggal dunia, puluhan warga Syi'ah terluka dan 37 rumah warga Syi'ah terbakar serta menyebabkan ratusan warga Syi'ah diungsikan ke Gedung Olahraga Sampang. Munculnya konflik yang berujung pada kekerasan ini ditengarai disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : faktor perbedaan madzhab didalam lingkungan internal Syi'ah, ditambah dengan kompleksitas perebutan hak waris antara Kiai Tajul Muluk dengan saudaranya. Selanjutnya adanya ancaman terhadap keberadaan Kiai Tajul dan kelompoknya.¹⁹

Selain beberapa faktor diatas faktor demografis di Kabupaten Sampang juga mempengaruhi eskalasi konflik antara Sunni-Syi'ah di Kabupaten Sampang. Dalam sensus penduduk BPS 2010 jumlah penduduk Sampang sebanyak 877.772 jiwa dan sebanyak 877.459 atau 99,96 % beragama Islam dan menjadikan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan mereka.²⁰ Selain itu nilai-nilai agama Islam telah mengakar kuat di masyarakat Madura, dan menjadikan ulama sebagai tokoh panutan utama. Para ulama di Sampang sepakat bahwa ajaran Syi'ah adalah ajaran sesat dan tak dapat ditolerir karena menyangkut penistaan dan penyimpangan agama Islam yang benar. Menurut Ketua MUI Sampang, KH Imam Bukhori Maksum ajaran Syi'ah dibiarkan akan

¹⁹ Febrihada Gahas CM, "Memahami Dinamika Konflik Syi'ah dan Kegagalan Upaya Rekonsiliasi", *Tesis Magister Ilmu Sosiologi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Magister Ilmu Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, 2014), hal 6

²⁰ Program Studi Damai dan resolusi Konflik, 2014, "Peran Budaya dalam Mewujudkan Harmonisasi dan Damai pada Masyarakat Kabupaten Sampang, Madura". "Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Cohort II, 2014.

berkembang menjadi sebuah penyakit sehingga perlu diamputasi atau dipotong agar tidak merusak akidah Islam secara keseluruhan.²¹

Kasus ini menjadi sorotan khalayak serta turut melibatkan banyak pihak dalam memecahkan masalah. Selain menyebabkan korban jiwa, kasus ini belum mendapat penyelesaian secara tuntas hingga kini. Para korban dari kelompok Syi'ah hingga kini masih diungsikan secara paksa dari Sampang ke Rumah Susun Puspo Agro, Sidoarjo. Relokasi yang dilakukan pada bulan Juni 2013 dengan mempertimbangkan alasan keamanan dan demi kehidupan yang lebih layak di lokasi pengungsian. Setidaknya warga Syi'ah yang diungsikan saat itu sebanyak 64 kepala keluarga, yang terdiri atas 224 jiwa, 20 balita, 103 anak-anak usia sekolah, 90 orang usia dewasa, dan 9 orang lansia diatas usia 60 tahun. Saat itu Pemerintah Kabupaten Sampang menyatakan bahwa pemindahan itu hanya bersifat sementara, dan pada saatnya warga Syi'ah akan kembali ke kampung halamannya di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Sampang, Madura.²²

Langkah relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang hanya sebagai langkah awal untuk melindungi korban penyerangan yang diperkirakan akan terjadi kembali jika warga Syi'ah kembali ke kampung halamannya. Beberapa upaya rekonsiliasi juga telah dipayakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diantaranya melalui proses islah antara pihak Sunni dan Syi'ah. Proses islah dengan mempertemukan 75 orang perwakilan Sunni dan 35 orang perwakilan Syi'ah. Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/238/KPTS/013 Tahun 2015 tentang Tim Terpadu Penanggulangan Konflik Sosial Provinsi Jawa Timur.

²¹ Program Studi Damai dan resolusi Konflik, *Op.Cit*, 32

²² Mundhiroh Lailatul Munawaroh, "Penyelesaian Konflik Sunni-Syiah Di Sampang Madura", *Tesis Magister* (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014) hlm. 5

Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jawa Timur ini sebenarnya merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Pasal 10 ayat (2). Namun semua usaha pemerintah provinsi maupun Pemerintah kabupaten Sampang untuk memulangkan semua anggota kelompok Syi'ah beelum dapat terlaksana secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kuatnya respon dan keterlibatan serta pengaruh para tokoh agama (Kiai) sebagai elite informal lokal di daerah konflik yang lebih kuat dibandingkan elit pemerintah daerah. Semua kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyelesaian konflik harus mengikuti keinginan pemuka agama (Kiai). Sehingga kuatnya pengaruh kiai dan lemahnya peran pemerintah daerah mengakibatkan konflik ini belum dapat terselesaikan dan memunculkan suatu perdamaian negatif serta kekerasan struktural maupun kultural.²³

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dan menjadi aktor utama dalam usaha penanganan konflik di wilayahnya. Pemerintah Daerah dapat dikatakan telah melaksanakan perannya dalam usaha penanganan konflik sosial telah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai yang telah ditetapkan dalam perundangan-undangan. Dalam hal pencegahan dan penanganan konflik sosial, pemerintah daerah memiliki tugas dalam Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah menyebutkan bahwa "Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".²⁴ Tugas pemerintah daerah dalam pencegahan konflik juga telah diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial bahwa :

²³ Mundhiroh Lailatul Munawaroh, *Op.Cit*, hlm. 7

²⁴ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 25 ayat (1).

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan terukur.
- (2) Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rekonsiliasi
 - b. Rehabilitasi
 - c. Rekonstruksi²⁵

Konflik yang sudah terjadi sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 yang berarti telah melewati pergantian Presiden dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, namun belum ada penyelesaian secara tuntas dan komprehensif untuk kedua pihak yang terlibat konflik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menyelesaikan konflik ini dengan mengetahui latar belakang terjadinya konflik agar dapat menemukan solusi yang tepat untuk penyelesaian konflik ini. Sehingga berdasarkan permasalahan yang ada, dalam hal ini ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji dari kasus penyelesaian konflik Sunni-Syi'ah yang terjadi di Sampang Madura tahun 2012 hingga 2012. *Pertama*, konflik Sunni-Syi'ah yang terjadi di Sampang dapat memicu konflik serupa di wilayah lain Provinsi Jawa Timur. *Kedua*, relokasi kelompok Syi'ah secara paksa dengan alasan keamanan dan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. *Ketiga*, Pemerintah Kabupaten Sampang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum dapat menyelesaikan kasus ini, sehingga para korban Syi'ah masih ditempatkan di tempat relokasi di Rusunawa Puspo Agro Sidoarjo sejak tahun 2013 hingga tahun 2018. Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur.

²⁵ Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Konflik Sosial , Pasal 36 ayat (1) dan (2).

Namun nampaknya peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jawa Timur dalam menangani konflik antara penganut Sunni dan Syi'ah di Sampang Madura belum sepenuhnya membuahkan hasil, terbukti hingga kini penganut Syi'ah belum dapat kembali ke kampung halaman mereka di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, dan masih menjadi pengungsi di rumah susun Puspo Agro, Sidoarjo.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban untuk segera menuntaskan konflik Sunni-Syi'ah Di Sampang Madura, jika Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak segera menangani konflik ini secara tepat, maka kemungkinan akan muncul kembali kekerasan dengan latar belakang perbedaan keyakinan antara Sunni dan Syi'ah. Bukan tidak mungkin pecahnya konflik Sunni-Syi'ah di Puger, Jember, Jawa Timur pada tahun 2013 sebagai efek domino konflik Sunni-Syi'ah di Sampang. Hal ini tentu akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional di Indonesia. Salah satu elemen keamanan nasional yang terancam adalah kondisi stabilitas sosial-politik. Penyelesaian konflik yang cenderung jalan ditempat akan semakin menambah kecurigaan dan ketegangan antara penganut Sunni dengan penganut Syi'ah bukan hanya di wilayah Sampang, namun juga diberbagai wilayah di Indonesia. Oleh sebab itu penyelesaian konflik antar penganut Sunni dan Syi'ah di Sampang menjadi sangat penting guna menjaga stabilitas sosial-politik di Indonesia.

Sehingga dari gambaran diatas peneliti ingin menganalisis peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penyelesaian Konflik Sunni-Syi'ah tersebut. Dan sejauh mana progres Pemerintah Jawa Timur untuk menyelesaikan konflik tersebut.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang memuat pokok masalah bersifat umum.

Sedangkan subfokus penelitian adalah sudut tinjauan dari permasalahan pokok yang ada dalam fokus penelitian. Berdasarkan pemaparan latar belakang konflik yang terjadi antara pemeluk Sunni dan Syi'ah di Kabupaten Sampang Madura, dan untuk mengetahui peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian konflik tersebut, maka disusunlah fokus dan subfokus penelitian sebagai berikut :

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian konflik Sunni dan Syi'ah di Sampang Madura. Dalam situasi seperti ini peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi sangat penting dalam penyelesaian konflik di Kabupaten Sampang. Keberhasilan penyelesaian konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura merupakan indikator keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelesaikan konflik sosial lainnya di Provinsi Jawa Timur.

1.2.2 Subfokus Penelitian

Secara spesifik penelitian yang dilakukan kepada permasalahan-permasalahan yang menjadi subfokus penelitian yaitu :

1. Latar belakang konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura.
2. Peranan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura dari tahun 2012 hingga 2018.
3. Optimalisasi peranan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian konflik Sunni-Syiah dari tahun 2012 hingga 2018 di Sampang Madura dan usaha preventif agar konflik serupa tidak kembali terjadi.

1.3 Rumusan Masalah

Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah "Peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penyelesaian Konflik Sunni-Syi'ah Studi Kasus di Kabupaten Sampang Madura Tahun 2012-2018"

Sehingga berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menjadi latar belakang dalam konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura ?
2. Bagaimana peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura dari tahun 2012 hingga 2018 ?
3. Bagaimana optimalisasi peran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura dari tahun 2012 hingga 2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal berikut :

1. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi latar belakang konflik Sunni-Syi'ah yang terjadi di Sampang Madura. Dengan mengetahui latar belakang konflik antara Sunni-Syi'ah di Sampang Madura, Pemerintah Provinsi dapat menemukan solusi penyelesaian konflik yang tepat yang terjadi antara kelompok-Sunni dan Syi'ah yang terjadi di Kabupaten Sampang, Madura.
2. Menganalisis peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura dari tahun 2012 hingga 2018. Selain untuk menciptakan damai yang berkelanjutan bagi penganut Sunni dan Syi'ah dan untuk mencegah terulangnya konflik serupa di wilayah Provinsi Jawa Timur, didapat melalui telaah serangkaian peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk untuk menyelesaikan konflik sosial dan sejauh mana Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan Peraturan perundang undangan tersebut dalam rangka menyelesaikan konflik Sunni-Syi'ah yang terjadi di Sampang Madura.

3. Menganalisis optimalisasi yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menciptakan *positive peace* bagi penganut Sunni-Syi'ah di Sampang Madura dari tahun 2012 hingga tahun 2018. Usaha-usaha yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian konflik dan menciptakan kondisi damai menjadi sangat penting agar konflik serupa tidak terulang di Provinsi Jawa Timur pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan dari hasil penelitian bagi masa depan, baik untuk kepentingan pengembangan sebuah program maupun untuk kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, manfaat penelitian harus diuraikan secara rinci manfaat dan hasil penelitian ini bagi masa depan. Adapun manfaat penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bentuk penerapan teori-teori dan konsep-konsep yang telah dipelajari pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik di Universitas pertahanan. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memperkaya khazanah penelitian mengenai upaya mencapai rekonsiliasi dan mewujudkan perdamaian yang berkesinambungan dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan diharapkan upaya tersebut mampu menjaga stabilitas nasional.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi ilmu pertahanan di Indonesia, mengingat bidang ilmu ini terus berkembang dari waktu ke waktu dalam menghadapi perubahan dalam lingkungan strategis sekaligus memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman kepercayaan dan keyakinan di Indonesia. Berdasarkan dua hal yang diuraikan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya

penelitian dalam tema terkait damai dan resolusi konflik serta ilmu pertahanan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta lembaga terkait dalam rangka mengetahui sebab-sebab terjadinya konflik antara Sunni-Syi'ah di Sampang Madura karena dengan mengetahui faktor penyebab konflik Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menemukan solusi penyelesaian yang tepat dalam konflik Sunni-Syi'ah di Sampang, Madura. Yang selanjutnya memberikan rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian konflik Sunni-Syi'ah di wilayah Jawa Timur, khususnya konflik yang terjadi di Sampang Madura dari tahun. Selain itu secara spesifik penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berupa usulan kebijakan yang akan dilanjutkan dengan langkah aksi untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan lembaga terkait yang menjadi Tim Terpadu Penanggulangan Konflik Sosial Provinsi Jawa Timur yang berdasar pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/238/KPTS/013 Tahun 2015. Tim Terpadu Penanggulangan Konflik Sosial Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Timur, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melihat sejauh mana lembaga-lembaga tersebut saling berkoordinasi dan bersinergi untuk terwujudnya upaya rekonsiliasi antara dua kelompok yang terlibat konflik di Sampang Madura.